

Pengertian harta bersama dan kompetensi relatif pengadilan agama atas gugatan harta bersama

Siregar, Ruben Jeffry M., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269557&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secara umum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersama menjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam hal ini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnya pihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh mana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaan atau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dari harta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh mantan suami atau mantan isteri. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Dari sudut sifatnya, penyusunan yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dalam tesis akan diperoleh suatu gambaran bahwa segala harta benda yang dihasilkan dari harta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan bagian dari harta bawaan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri atau mantan suami adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.

<hr>

ABSTRACT

Marriage Law and Islam Law Compilation describe private property and joint property in general simple definition. Apparently, this general simple definition cause problems especially regarding settlement of joint property fission

dispute in Religion Court. Usually, wife party suffer a lot of damages because husband party physically dominate joint properties. Problems that will be discussed in this thesis are the description of join properties that produced from private property which is gained during the marriage period, and relative competence of the Religion Court which has authority to judges the joint property law suit which is submitted by former husband or wife. This thesis use jurisdiction normative research method and organized by descriptive of analysis research type. Furthermore, this thesis will describes properties which is produced from private property should be named as private property although gained during the marriage period, and the Religion Court that has authority to judge the joint property law suit is Religion Court of accused domicile.